Radar Bali

ZULFIKA RAHMAN/RADAR BALI

DIPERIKSA BPK: Tim BPK RI Perwakilan Bali berpamitan kepada Pemkab Tabanan setelah melakukan pemeriksaan keuangan selama 40 hari.

40 Hari, BPK Audit Keuangan Pemkab Tabanan

Cegah Penyimpangan

TABANAN - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bali menuntaskan pemeriksaan di Pemkab Tabanan, Sabtu (18/3) kemarin.

Sekadar diketahui, pemeriksaan yang dilakukan selama satu bulan lebih ini untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan atau korupsi yang melibatkan para pejabat. Setelah tuntas mengaudit, tim BPK RI perwakilan Bali berpamitan yang diterima langsung Wakil Bupati Tabana I Gede Komang Sanjaya.

Tim BPK RI Perwakilan Bali yang dipimpin oleh Yulindra Tri Kusumo Nugroho sejatinya melakukan pemeriksaan dari tanggal 6 Februari hingga tanggal 7 Maret kemarin. Dan tidak ada masalah yang terlalu penting yang mereka temukan karena Pemkab Tabanan dalam pembuatan LK sudah sesuai dengan prosedur.

"Apabila ada temuan berupa Tipikor, BPK wajib menindaklanjuti dan setelah batas waktu tersebut bukan lagi ranah BPK," kata Nugroho.

Kenapa harus ada pemeriksaan intern, karena ini dikatakannya bertujuan membantu Pemkab melakukan *review* sehingga apa yang keliru bisa diperbaiki.

Sementara itu, Sanjaya berterimakasih kepada tim dari BPK perwakilan Bali yang sudah membantu. **(zul/dot)**

Edisi : Sabtu, 20 Maret 2017

Hal : 23

Radar Bali

Anggota Dewan Tersangka Diperas

Dimintai Uang Rp 200 Juta, Ditransfer Rp 100 Juta

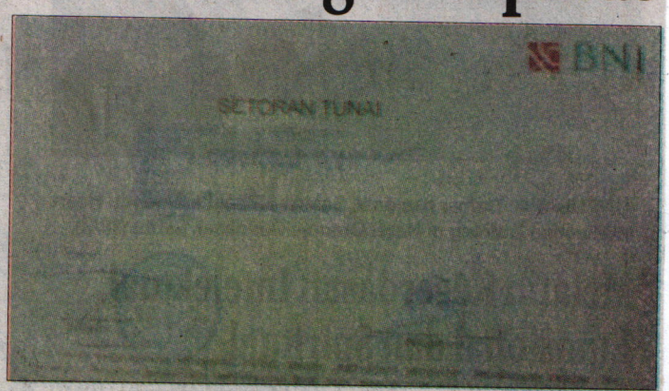

IST.

BUKTI: Bukti transfer via rekening BNI yang dikirim ke istri oknum Kasatreskrim.

DENPASAR – Apes nian nasib anggota DPRD Klungkung Wayan Kicen Adnyana. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah 2015, Kicen mengaku coba diperas sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Kepada *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (19/3), Kicen mengaku diperas oknum yang mengaku Kasatreskrim Polres Klungkung AKP Andre Wiastu sebesar Rp 200 juta jika ingin kasusnya dihentikan.

"Ya, benar, saya membuat laporan ke Polda Jumat (17/3) lalu karena diperas oknum di Polres Klungkung," ujar Kicen Adnyana. Menurut Kicen, pemerasan yang dialaminya 30 Mei 2016 lalu. Saat itu, Kicen ditelepon nomor tak dikenal sebanyak empat kali. Diduga pemilik nomor itu berkoordinasi dengan Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru. Pasalnya, Wayan Baru yang menyarankan Kicen keluar sebentar untuk menerima telepon.

"Setelah saya tanya, siapa pemilik nomor itu, dijawab (Wayan Baru) bos kita, Kasatreskrim Polres Klungkung," kutip Kicen. Komunikasi antara Kicen dengan oknum Kasatreskrim pun terjadi. Intinya, si oknum menawarkan bantuan menyelesaikan kasusnya. "Kompensasinya, dia minta Rp 200 juta. Saya tidak langsung mengiyakan karena harus berkonsultasi dengan keluarga. Ternyata, keluarga saya hanya bisa menyiapkan Rp 100 juta," kata Kicen.

Awalnya, dana itu akan diserahkan langsung di Polres Klungkung. Tapi, sang oknum berdalih di mapolres banyak wartawan. Uang Rp 100 juta itu akhirnya ditransfer ke rekening BNI 30565xxxxxx milik Anggraeni Agustia. Besoknya, si oknum mengatakan ke Kicen kalau pada saat mentransfer ada Kajari di sampingnya. "Saya kemudian dimintai Rp 50 juta untuk Pak Kajari. Tapi, saya langsung minta maaf karena saya tak punya uang lagi," bebernya.

Yang membuatnya kecewa, dia justru dijadikan tersangka. Karena merasa jadi pemerasan, dia mengadukan kasusnya ke Polda Bali. Kabidhumas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja mengatakan belum mendapat informasi kasus tersebut. "Kalau ada laporan, tentu kami akan panggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," pungkasnya. **(dre/mus)**

Edisi : Senin, 20 Maret 2017

Hal : 23

Radar Bali

FOTO:MIFTAHUDDIN/RADAR BALI - GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

ASET PEMPROV: Areal pantai depan Hotel St.Regis yang menjadi lokasi mandi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud diduga milik Pemprov Bali.

Hotel Raja Salman Disorot

Disebut Sebagian Pakai Aset Pemprov

DENPASAR - Hotel St. Ragis Resort, tempat menginap Raja Salman Bin Abdul Azis Al-Saud, mendapat sorotan DPRD Bali. Hotel super mewah di kompleks ITDC (sebelumnya bernama BTDC) Nusa Dua, itu sebagian bangunannya berdiri di atas aset milik Pemprov Bali. Aset Pemprov Bali yang digunakan pihak hotel seluas dua hektare.

Dewan menilai aset serta kontrak kerja sama hotel perlu diusut. Sebab, selama ini dewan tidak pernah mengetahui jalinan kerja sama pihak hotel dengan eksekutif. "Kami ingin tahu, bentuk kerja sama seperti apa. Bentuknya saham atau dapat setoran tunai dari hotel. Kalau berupa uang, uangnya masuk di pos mana," tandas Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya kemarin (19/3).

Aset tanah pemrov di Hotel St. Regis berada di dekat areal kolam renang. Letaknya berada persis menghadap pantai. Sebagai wakil rakyat, dewan selama ini tidak pernah mendapat laporan aset pemprov di ITDC. Buntutnya dewan mencurigai aset pemprov banyak menguap tak jelas. Informasi yang didapat Tenaya, awal penataan ITDC tahun 1979, aset pemprov seluas 52 hektare.

Namun, kini tinggal 39 hektare. Artinya selama ini diduga ada penyusutan lahan seluas 13 hektare. Menurut Tenaya, penyusutan lahan tersebut perlu diselidiki. Sebab, nilai tanah di Nusa Dua cukup fantastis. "Jangan sampai aset pemprov terus menyusut dan habis jadi hak milik orang atau perusahaan. Ini yang perlu diselidiki dan diungkap," tukas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain Hotel St. Regis, aset pemprov lainnya berada di Hotel Grand Hyatt dan Shangrila. Pemprov Bali memiliki aset pada tiga hotel berbintang tersebut. Khusus Shangrila, lanjut Tenaya, kerjasama dengan pemprov bakal berakhir tahun 2018. Usai hari raya Nyepi, dewan merencanakan membentuk panitia khusus (pansus) menyelidiki aset milik pemprov. Pansus dibentuk selesai pansus LKPJ selesai bertugas.

Yang perlu diselidiki, lanjut Tenaya, aset tanah pemprov semua sudah memiliki sertifikat atau belum. Katanya, bisa saja aset pemprov berubah menjadi aset pribadi atau perusahaan. Tidak hanya dibangun hotel, tapi bisa dibangun akomodasi pariwisata lain seperti vila. "Jangan sampai aset pemerintah habis tapi tidak jelas hasilnya. Berapa triliun uang akan hilang jika tidak jelas kepemilikannya," tandas pria berkacamata itu.**(san/mus)**

Edisi : Senin, 20 Maret 2017

Hal : 23

Radar Bali

Sidak ATV Bodong Diduga Main Mata

Kepala OPD Akan Diadukan ke Bupati

GIANYAR – Sidak terhadap wisata All Terrain Vehicle (ATV) Kuber Bali Adventure yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Kabupaten Gianyar dipertanyakan. Sidak yang berlangsung Jumat (19/3) di lokasi wisata di Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, dinilai hanya main-main walaupun pihak DPMPT mengaku sudah menutup.

Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (GARPPAR) Gianyar, Ngakan Made Rai, menyatakan, dalam menegakan Perda, tim dari DPMPT tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus mengajak tim gabungan seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). "Banyak yang menduga Dinas Perizinan (DPMPT) ada main dengan investor," ujarnya.

Semestinya, jika mengacu kepada aturan, wisata Kuber Bali Adventure ini diberikan Surat Peringatan (SP) karena nekat beroperasi tanpa izin lengkap. Namun yang terjadi, pengelola hanya diberikan imbauan saja. "Karena tidak mengajak petugas Satpol PP, Dinas Perizinan (DPMPT) tidak bisa mengeluarkan SP I, tetapi hanya sebatas mengimbau saja. Kalau seperti ini Pemkab Gianyar bisa dianggap macan ompong," keluhnya.

Ngakan Rai menyebut, pemerintah jangan asal sidak lalu memberikan ruang mengurus perizinan. Pemerintah wajib melihat situasi dan kondisi di lapangan. Apalagi, ada subak yang dilintasi termasuk situs bersejarah berupa terowongan era penjajahan Jepang. "Harus benar-benar dikaji, karena banyak masyarakat yang keberatan dan juga bisa merusak terowongan zaman Jepang," jelasnya.

Selain itu, Ngakan Rai mempertanyakan apakah kendaraan ATV yang digunakan berwisata itu legal atau tidak. Jangan-jangan selundupan. "Semestinya mengajak unsur kepolisian untuk mengecek keabsahan ATV yang dipakai," tandasnya.

Pria asal Sampiang, Kecamatan Gianyar ini, menyayangkan jika tim dari DPMPT percaya begitu saja dengan alasan uji coba yang dikatakan pihak investor. Kalau itu benar uji coba, semestinya hanya dilakukan beberapa orang saja dan juga tidak memasang baliho termasuk memasang promosi di media sisial.

Ditegaskan, dia akan menghadap ke bupati dan wakil bupati untuk melaporkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang mendukung ketegasan bupati dan wakil bupati dalam menegakan Perda. **(dra/rid)**

Edisi : Senin, 20 Maret 2017
Hal : 22